

## **YOGYAKARTA KOTA PENDIDIKAN: PERUBAHAN SOSIAL KOTA YOGYAKARTA 1880-1930**

**Filipus Dimas Darumurti<sup>1\*</sup>, Miftahuddin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>SMA Kolese De Britto, Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>2</sup>Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta

\*Email: filipusdimas.2021@student.uny.ac.id

**Abstract:** *Yogyakarta is a city that continues to change, grow and develop with its social dynamics. This social change in the city of Yogyakarta has a significant impact on the development of education in Yogyakarta. This study aims to explain the social changes of the people of the city of Yogyakarta and explain the dynamics of the development of education in Yogyakarta in 1880-1930. The method used in this research is to a literature study with analytical descriptives. This research shows that the situation of the palace and the colonial situation influenced the social changes of the city of Yogyakarta in various fields of life, including the field of education. The dynamics of the development of education in Yogyakarta is growing rapidly with the presence of various schools which are managed by the government and the private sector. Finally, Yogyakarta has the characteristics of education so that it is known as the city of education.*

**Keywords:** *Social Change, Education, Yogyakarta City*

**Abstrak:** Yogyakarta merupakan kota yang terus berubah, bertumbuh dan berkembang dengan dinamika sosialnya. Perubahan sosial kota Yogyakarta ini memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan pendidikan di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan sosial masyarakat kota Yogyakarta dan menjelaskan dinamika perkembangan pendidikan di Yogyakarta tahun 1880-1930. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dengan deskriptif analitis. Penelitian ini menunjukkan bahwa situasi keraton dan situasi kolonial mempengaruhi perubahan sosial kota Yogyakarta dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan. Dinamika perkembangan pendidikan di Yogyakarta tumbuh pesat dengan hadirnya berbagai sekolah yang beragam jenisnya yang diusahakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Akhirnya Yogyakarta memiliki ciri khas pendidikan sehingga dikenal sebagai kota pendidikan.

**Kata Kunci:** *Perubahan Sosial, Pendidikan, Kota Yogyakarta*

## PENDAHULUAN

Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan oleh khalayak umum. Hal ini karena banyaknya sekolah-sekolah terutama jumlah dan ragamnya perguruan tinggi di Yogyakarta (Subanar, 2007). Sejak Yogyakarta menjadi Ibukota maka kebutuhan akan tenaga kerja semakin meningkat. Dampaknya adalah dibutuhkan tenaga kerja yang andal yang dapat bekerja dalam berbagai bidang pemerintahan maupun swasta, maka pendidikan menjadi sarana memenuhi hal tersebut. Lembaga-lembaga pendidikan di Yogyakarta kemudian semakin meningkat terutama pada jenjang pendidikan tinggi. Perkembangan ini terjadi begitu cepat karena adanya suatu kebutuhan dalam masyarakat itu sendiri seperti tenaga birokrasi, ilmuwan, pemikir tradisi dan agama, tenaga guru dan tenaga ahli dalam bidang seni dan budaya (Subanar, 2007). Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam masyarakat yang semakin modern dan kompleks.

Semakin modern dan kompleksnya masyarakat maka menempatkan pendidikan pada bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat karena kehidupan sosial dan budaya masyarakat turut berpengaruh bagi perkembangan pendidikan yang di dalamnya terdapat perkembangan dan perubahan masyarakat baik dalam hal kebiasaan, adat istiadat, pemikiran dan lain sebagainya. Dikatakan juga bahwa pendidikan ini bagian tak terpisahkan dari kebudayaan dimana untuk mempertinggi dan memperhalus kehidupan manusia seutuhnya dan menyempurnakan kehidupan masyarakat (Subanar, 2007). Oleh karena itu sejak zaman dahulu pendidikan di Indonesia terus diusahakan oleh masyarakat supaya dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk kesejahteraan hidup.

Seperti halnya kata-kata bijak "*Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat*", yang diungkapkan oleh HOS Cokroaminoto

yang berbicara tentang Pendidikan (Tomoredjo, 2016). Dari hal tersebut jelas bahwa pendidikan merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan supaya setiap manusia menjadi manusia yang cerdas dan beriman. Demikian juga dengan kalimat "*mencerdaskan kehidupan bangsa*", kalimat tersebut merupakan salah satu tujuan nasional negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (Sekretariat Jendral MPR RI, 2020). Cara yang bisa digunakan untuk melakukan pencerdasan bangsa yaitu dengan pendidikan. Kalimat tersebut memastikan dan menjamin bahwa bangsa Indonesia harus memperoleh pendidikan yang layak yang merupakan bagian dari pencerdasan bangsa. Pendidikan merupakan hal yang penting dilakukan dalam rangka mewujudkan bangsa yang cerdas dan beradab. Pendidikan menjadi kunci utama sebagai sarana untuk mewujudkan hal tersebut.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003). Pendidikan harus mampu mengembangkan siswa dalam semua aspek kehidupan baik kognitif, psikomotorik dan afeksi.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan sistem pendidikan nasional yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003).

Dalam melaksanakan pendidikan harus melihat konteks supaya sasaran dan tujuannya bisa tepat. Konteks bisa dilihat dari keadaan siswa dan tempat atau lingkungannya, tetapi tetap memperhatikan tujuan nasional pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki peran yang sentral dalam mengatur semuanya ini karena di dalamnya terdapat kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum tidak hanya menyampaikan pengetahuan akademis saja tetapi mampu membuat para siswa berperilaku sebagai akademisi melalui pengalaman sehingga siswa berpikir dan bertindak (ASJI, 2017). Siswa juga diajarkan pengetahuan dan pemahaman supaya bisa menciptakan keadaan masyarakat yang lebih baik dengan mengarahkan para siswa masuk dalam kehidupan budaya sehingga membuat suatu perubahan yang lebih baik (ASJI, 2017).

Melihat jauh ke belakang sebelum Indonesia merdeka dalam kurun waktu tahun 1880-1930 atau bahkan sebelumnya, pendidikan di Yogyakarta juga sudah berkembang. Jumlah lembaga pendidikan atau sekolah yang ada di Yogyakarta pada waktu itu semakin banyak bahkan juga muncul tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh. Pendidikan modern di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pengaruh Barat terutama dari Belanda pada saat kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Bangsa Barat terutama Belanda membawa pengaruh pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan dan

pengajaran khas mereka. Dalam kurun waktu 1800-1900an pendidikan di Yogyakarta diselenggarakan di sekitar keraton dengan pengajar oleh tokoh-tokoh kerajaan dan agama (Sugiyanto, 2004). Baru setelah tahun 1900 dibarengi dengan perkembangan politik etis pendidikan di Yogyakarta semakin meningkat dan berkembang.

Politik etis merupakan konsep politik balas budi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia karena sudah mendapatkan keuntungan dari Indonesia. Politik ini mempunyai prinsip dan tujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan penduduk pribumi dengan mengupayakan peningkatan kesehatan, transportasi, berbagai proyek pengembangan perkotaan, dan mendirikan sekolah-sekolah (Lombard, 2005a). Politik etis ini membawa perkembangan dalam pendidikan di Indonesia terutama penyelenggaraan sekolah-sekolah bagi orang-orang Indonesia dan Cina. Kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan didasarkan pada pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak banyaknya untuk golongan Bumiputra dan pemberian pendidikan rendah untuk golongan Bumiputra yang disesuaikan dengan kebutuhan (Sanjaya, 2001). Jumlah sekolah-sekolah rendah yaitu HIS (*Hollands Inlandsche School*) meningkat, bahkan sampai dengan sekolah-sekolah menengah seperti MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) dan AMS (*Algemene Middelbare School*).

Keberadaan Yogyakarta sebagai sebuah kota menunjukkan adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial ini menunjukkan bahwa masyarakat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan ini mulai dari perubahan fisik maupun non fisik. Bidang Pendidikan merupakan salah satu bidang yang terdampak dari perubahan sosial tersebut dan juga memberikan pengaruh

kepada perubahan-perubahan sosial masyarakatnya. Oleh karena itu bidang pendidikan ini menarik untuk dikaji terutama dalam konteks perubahan sosial masyarakat kota.

Julukan Yogyakarta sebagai kota Pendidikan sudah melekat pada kota ini dan menjadi *branding* tersendiri bagi masyarakatnya. Terlebih dalam kurun waktu 1880-1930 merupakan waktu dimana terjadi perubahan sosial masyarakat Yogyakarta menjadi sebuah masyarakat kota dengan perkembangan pendidikan yang signifikan terutama juga muncul pesatnya lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah baik dari pemerintah maupun pihak swasta.

Perubahan masyarakat desa menjadi masyarakat kota juga turut serta menyumbang perkembangan pendidikan di Yogyakarta. Perubahan ini merupakan perubahan sosial kota Yogyakarta yang berdampak signifikan bagi perkembangan pendidikan di Yogyakarta. Perubahan sosial masyarakat kota Yogyakarta ini memberikan pengaruh pada dinamika perkembangan pendidikan di Yogyakarta tahun 1880-1930. Maka tidak heran jika Yogyakarta mendapat julukan sebagai kota pendidikan.

#### **METODE PENELITIAN**

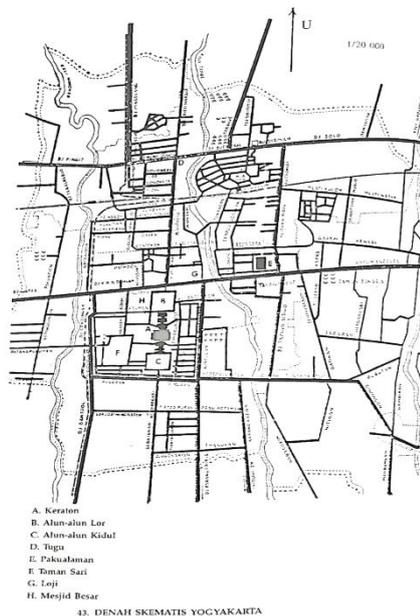
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasi dari berbagai sumber yang dijelaskan secara deskriptif analitis. Dimulai dengan pengumpulan sumber-sumber yang terkait seperti buku, jurnal dan artikel pendukung. Dari sumber-sumber tersebut kemudian dilakukan kritik dengan melakukan perbandingan satu sama lain, menilai kelayakan sumber dan kepercayaan informasi yang terkandung di dalamnya. Dengan kritik sumber kemudian didapatkan data yang terpercaya sehingga dapat dilakukan interpretasi sejarah dengan menghubungkan peristiwa dan fakta-fakta

sejarah sesuai dengan topik bahasan. Kemudian setelah itu dilakukan penulisan sejarah atau historiografi.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN Perubahan Sosial dan Pendidikan Masyarakat Kota Yogyakarta**

Yogyakarta merupakan bagian wilayah Pulau Jawa yang tidak dapat dilepaskan dari proses kolonisasi yang dilakukan bangsa Barat khususnya Belanda. Sejak adanya Perjanjian Giyanti yang mengesahkan pembagian Mataram menjadi dua kerajaan yaitu Surakarta dan Yogyakarta, yang kemudian disusul pembagian lagi Surakarta dengan Mangkunegaran, Belanda semakin mendominasi kedudukannya di Jawa (Lombard, 2005a). Dengan dominasi ini pengaruh bangsa Barat semakin nyata dan mewarnai kehidupan masyarakat di berbagai bidang baik politik, ekonomi, budaya dan sosial.

Wilayah Yogyakarta yang di dalamnya ada kerajaan yaitu keraton Yogyakarta/Kesultanan Yogyakarta merupakan awal bagi terbentuknya wilayah kota Yogyakarta. Pertumbuhan kota yang bermula dari keraton tersebut berada pada dua aliran sungai yang sejajar yaitu Kali Winongo dan Kali Code. Pemukiman dibangun bersebelahan dengan poros besar utara-selatan, melintasi istana ke alun-alun utara, ke Jalan Malioboro sampai dengan Tugu. Kemudian terdapat daerah Pakualaman sebagai daerah Kadipaten dan daerah-daerah lainnya (Lombard, 2005b). Hal ini menunjukkan bahwa keraton beserta dengan pemukiman yang ada tersusun dengan rapi. Kemudian di daerah sekitarnya terdapat pasar sebagai penggerak perekonomian, daerah Pecinan, dan permukiman masyarakat Eropa (Lombard, 2005b). Untuk gambaran lebih jelas dapat dilihat pada gambar denah skematis Yogyakarta berikut ini:



**Gambar 1. Denah Skematis Yogyakarta**

Sumber: Lombard, 2005b

Dalam dinamika kehidupan masyarakat, keraton menjadi pusat perkembangan masyarakat karena di sana merupakan sebuah kompleks tempat orang bekerja seperti pemuka agama, pegawai administrasi, para seniman dan lain sebagainya. Yogyakarta sebagai sebuah kota merupakan lingkungan tempat berbagai golongan masyarakat saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari (Surjomihardjo, 2000). Tumbuhnya kota sangat dipengaruhi oleh situasi kolonial pada waktu itu yang kebutuhannya semakin meningkat. Jalan raya menjadi awal mula atau sebagai pembuka untuk memperlancar pemenuhan kebutuhan kemudian mulai mendirikan kantor-kantor pemerintahan dan benteng. Pemukiman Eropa mulai muncul dilengkapi dengan klub-klub dan lapangan pacuan kuda. Roda perekonomian mulai bergerak sehingga kota menjadi tempat usaha orang Eropa dalam perkebunan dan pertanian terutama industri tebu. Untuk memperlancar

mobilitas dilengkapi dengan jalan kereta api dan membangun jembatan-jembatan penghubung. Kota ini menjadi tempat bertemunya banyak orang dari berbagai golongan karena merupakan pusat pemerintahan (Surjomihardjo, 2000).

Yogyakarta menjadi kota *learning society* dimana membangun hidup bersama sebagai masyarakat yang saling terhubung dalam menanggapi situasi yang terus berubah dan merupakan satu kesatuan sebuah komunitas hidup bersama (Subanar, 2007). Dalam konsep ini dinamika masyarakat terus berubah, berkembang dan menuju modernitas masyarakat. Pembangunan di Yogyakarta berkembang cepat untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan kolonial. Pertumbuhan penduduk juga semakin cepat karena banyak orang yang berdatangan ke Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti menjadi pegawai, pedagang, pengrajin, dan lain sebagainya. Tercatat penduduk kota berjumlah 98.000 orang dan kurang lebih 10.000 orang asing pendatang pada tahun 1916 (Surjomihardjo, 2000).

Situasi kota juga mendorong munculnya kelompok-kelompok sosial seperti kelompok orang Eropa, orang Asing (Cina, India dan Arab), golongan Bumiputra, kelompok Kauman, dan Gerakan Mason. Kelompok-kelompok atau golongan-golongan ini memberikan warna tersendiri bagi perkembangan pendidikan di Yogyakarta. Contohnya yaitu kelompok Kauman yang mendirikan organisasi Muhammadiyah mampu melahirkan pendidikan Islam sampai dengan sekarang ini, orang-orang Eropa dengan kegiatan *misi* dan *zending* mampu membuat sekolah-sekolah Katolik dan Kristen, golongan Cina atau Tionghoa juga mendirikan sekolah-sekolah untuk keturunan mereka dan gerakan Mason yang mempunyai keinginan serta usaha untuk meningkatkan pendidikan bagi penduduk bumiputra.

Pengaruh pendidikan menjadi meningkat sehingga banyak masyarakat

yang kemudian ingin bersekolah dan mengenyam bangku pendidikan. Hal ini juga sebagai dampak dari perubahan sosial masyarakat dimana diperlukannya peningkatan mutu para pegawai baik pegawai pemerintahan maupun pegawai swasta. Sistem ujian bagi para pendaftar pekerjaan untuk dapat mendapatkan pekerjaan juga turut mempengaruhi meningkatnya pengaruh pendidikan bagi masyarakat. Munculnya pekerjaan-pekerjaan dan jabatan baru seperti polisi, juru tulis, tata usaha dan lain sebagainya (Surjomihardjo, 2000) juga turut mempengaruhi perkembangan pendidikan karena pekerjaan-pekerjaan tersebut membutuhkan keahlian khusus yang mereka dapatkan dalam bangku sekolah atau pendidikan. Dapat dikatakan bahwa pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan akan tenaga kerja terutama tenaga kerja dalam pemerintahan kolonial.

Pendidikan ini juga semakin berkembang karena paham-paham yang dibawa oleh pemerintah kolonial terutama tentang kebebasan, hak mengatur diri sendiri, demokrasi, dan kemajuan di berbagai bidang (Surjomihardjo, 2000). Pendidikan ini juga memunculkan para golongan cendekiawan yang menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia. Secara umum dalam situasi masyarakat Jawa (di dalamnya termasuk Yogyakarta) para orang tua merasa perlunya pendidikan yang baik dan teratur bagi anak-anak mereka (Lombard, 2005a) padahal pada waktu itu sekolah-sekolah untuk anak bumiputra jumlahnya masih terbatas. Yogyakarta yang berkembang sebagai kota semakin menunjukkan perkembangan dalam bidang pendidikan. Perubahan keadaan sosial, politik dan ekonomi masyarakat turut memberikan pengaruh yang signifikan dalam perkembangan pendidikan dan pertumbuhan sekolah-sekolah di Yogyakarta.

### **Yogyakarta dan Dinamika Pendidikan**

Dinamika pendidikan di Yogyakarta muncul dari lingkungan Keraton yang hanya mencakup anak-anak bangsawan dan rakyat yang tinggal di sekitar kerajaan saja. Materi yang diajarkan berkaitan dengan keterampilan hidup, sikap dan etika. Kedatangan Belanda di Indonesia, Jawa dan khususnya di Yogyakarta memberikan warna bagi pendidikan yang dilaksanakan karena mengajarkan ilmu pengetahuan yang lebih modern dengan mengajarkan bidang politik dagang, kebudayaan, pertanian, bahasa, budaya dan hukum. Sebagai contoh, pada tahun 1900 di lingkungan Keraton didirikan sekolah Gubernemen (Sugiyanto, 2004). Untuk perbandingan secara umum perkembangan jumlah sekolah di Hindia Belanda yang banyak terdapat di Jawa sebagai berikut; pada tahun 1883, 129 sekolah, tahun 1898, 164 sekolah, tahun 1905, 184 sekolah, dan tahun 1917 terdapat 198 sekolah (Lombard, 2005a).

Sekolah-sekolah ini masih banyak yang sebatas untuk anak-anak Belanda, kelas bangsawan, dan kebutuhan pegawai kolonial. Pendidikan yang dilaksanakan berorientasi pada kebutuhan tenaga bermutu tinggi bagi keperluan ekonomi dan birokrasi dan kebutuhan pendidikan kelas rendah bagi kebutuhan industri dan sektor lainnya (Sanjaya, 2001). Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan untuk rakyat bumiputra masih terbatas. Contohnya, pendidikan untuk rakyat bumiputra di Jawa (dapat menjadi gambaran pendidikan di Yogyakarta) sekolah negeri bumiputra dibagi dalam dua kategori yaitu sekolah kelas 1 dan sekolah kelas 2 (berdasarkan pasal 1 Surat Keputusan Raja 28 September 1892 nomor 44) (Depdikbud, 1977). Dari pembagian tersebut sekolah kelas 2 merupakan tempat pendidikan bagi rakyat bumiputra pada umumnya.

Pada perkembangannya sekolah-sekolah rakyat ini dibagi menjadi sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah desa.

Pemenuhan kebutuhan bagi sebagian besar rakyat seperti petani, nelayan, pekerja tangan dan lain sebagainya dapat dipenuhi dengan pendirian sekolah desa oleh desa sendiri dan didirikan agak jauh dari sekolah pemerintah atau sekolah swasta yang sejajar, sedangkan sekolah pemerintah hanya untuk anak-anak yang ingin menjadi pegawai negeri atau pegawai dengan keterampilan dan perdagangan dan sekolah pemerintah ini didirikan di tempat dengan berbagai kelas penduduk (Depdikbud, 1977). Dengan seperti itu pendidikan untuk semua golongan masyarakat khususnya bumiputra diharapkan dapat terpenuhi dan semakin diperluas.

Perubahan dan perkembangan masyarakat kota, khususnya dengan adanya desentralisasi memungkinkan terbentuknya daerah otonom (Siregar, 2020). Daerah otonom ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri dan masyarakat dapat mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Masyarakat semakin terbuka karena adanya berbagai kemajuan pengetahuan dalam berbagai bidang. Demikian juga halnya dalam bidang pendidikan yang terpengaruh oleh pendidikan Barat memunculkan sekolah-sekolah modern. Sebelum tahun 1900 pendidikan yang dilaksanakan berorientasi pada pendidikan barat (Belanda) dengan tiga tipe yaitu sekolah untuk anak-anak Belanda (ELS), anak-anak Indonesia (HIS), dan anak-anak Cina (HCS) (Latifa, 2016). Dari ketiga tipe ini ELS tetap yang menjadi unggulan dan mendapatkan prioritas. Di Yogyakarta sekolah modern pertama didirikan pada 1832 oleh anggota tentara Belanda (Latifa, 2016).

Perkembangan selanjutnya pada 1879 terdapat satu sekolah pemerintah dan satu sekolah partikelir yang berada di daerah Paku Alam, pada 1890 Sultan mendirikan sekolah di Srimanganti untuk anak para bangsawan dan para abdi dalem, didirikan juga sekolah partikelir di

Kalasan, Kejawon, Jejeran, Wonogiri, Bantul, Kreteg, Sleman, Klegung, dan Godean (Surjomihardjo, 2000). Melihat perkembangan sekolah-sekolah tersebut terutama sekolah partikelir menunjukkan bahwa pemerintah, kesultanan dan masyarakat mempunyai antusiasme untuk memberikan dan mengembangkan pendidikan di Yogyakarta. Terjadi pendidikan berkesinambungan dengan jaman penjajahan Belanda yang melibatkan banyak orang dan banyak tokoh. Pada 1908 pemerintah mendirikan sekolah kelas dua di Ibukota, Bantul, Sleman, dan Kalasan. Sekolah-sekolah partikelir juga didirikan di berbagai daerah seperti di Mataram 13 buah, di Gunung Kidul 4 buah, dan di Kulon Progo 9 buah (Surjomihardjo, 2000). Jumlah sekolah di Yogyakarta pada awal 1908 dapat dibagi menjadi tiga jenis pengajaran yaitu pengajaran pemerintah, pengajaran partikelir, dan pengajaran pemerintah daerah.

Menginjak tahun 1930 jumlah sekolah di Yogyakarta semakin banyak dan bervariasi yaitu 162 buah sekolah oleh pihak swasta diantaranya diusahakan oleh *missie* 61 buah, oleh *zending* 15 buah, oleh Muhammadiyah 72 buah, dan lain sebagainya, sedangkan oleh pemerintah sejumlah 278 buah dengan persebaran di kota Yogyakarta 68 buah, Bantul 89 buah, Gunung Kidul 47 buah dan Kulon Progo 74 buah (Surjomihardjo, 2000). Data tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah dan masyarakat memperhatikan dan mengusahakan pendidikan di Yogyakarta dapat berkembang untuk mendidik masyarakat. Hal yang menarik mengenai pendidikan di Yogyakarta yaitu bahwa para pemangku pemerintahan dan para tokoh tidak mengabaikan untuk mengembangkan pendidikan yang bersifat keindonesiaan. Pendidikan yang bersifat Indonesia tetap diusahakan untuk diberikan kepada para siswa bahkan dipadukan dengan model pendidikan barat yang memang membawa

warna bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya di Yogyakarta berkembang sekolah-sekolah Kristen, Sekolah Katolik, Muhammadiyah dan Taman Siswa. Sekolah Kristen yang berkembang yaitu MULO di Klitren, ELS di Gondolayu, HCS di Gemblakan, Sekolah Kelas II di Klitren dan Tungkak. Selanjutnya sekolah Katolik pertama berkembang pada tahun 1917 oleh Pater van Driessche dan berkembang pada tahun 1918 dengan 4 kelas jumlah siswa 200 orang. Sekolah *Missie* ini semakin berkembang pada tahun 1923 ada 18 kelas dengan 14 ruang kelas untuk jenjang HIS dan 4 ruang untuk jenjang MULO (Surjomihardjo, 2000). Pendidikan di Yogyakarta memiliki ciri khasnya sendiri dengan kehadiran Muhammadiyah dan Taman Siswa. Pada tahun 1912 KH. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah yang diikuti dengan pendirian sekolah-sekolahnya. Tahun 1922 Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Taman Siswa yang bertujuan untuk mendidik siswa memiliki rasa keindonesiaan seperti berkebangsaan, patriotik, dan cinta tanah air (Sugiyanto, 2004).

Pendirian sekolah-sekolah ini merupakan reaksi atas perkembangan pendidikan barat dan semakin mendominasinya sekolah Kristen di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan pendidikan yang berbasis agama Islam dan Taman siswa lebih berbasis pada budaya dan nasionalisme. Kedua lembaga pendidikan ini kemudian memberikan warna dan ciri khas tersendiri bagi perkembangan pendidikan di Yogyakarta sampai sekarang ini. Yogyakarta dan dinamika pendidikan yang terjadi di kota ini banyak dipengaruhi oleh adanya keraton dan pemerintah kolonial sebagai pemangku kepentingan. Yogyakarta ditempatkan pada kota yang memiliki dua kepentingan yaitu kepentingan tradisional dan kepentingan kolonial, hal ini disebabkan karena kota yang muncul dari

keraton yang diawasi oleh pemerintah kolonial. Dua kepentingan ini berpengaruh pada berbagai bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan dalam pertumbuhan dan perubahan masyarakat kota.

## KESIMPULAN

Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan memiliki sejarah panjang untuk mencapainya. Banyak dan beragamnya jenis sekolah di Yogyakarta semakin memperkuat predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Dapat dilihat dari perkembangan pendidikannya terutama sekolah-sekolah yang tumbuh berkembang dari tahun 1880-1930 tersebut. Pendidikan di Yogyakarta menjadi *learning society* bagi semua masyarakat yang di dalamnya terdapat pendidikan seumur hidup. Pendidikan di Yogyakarta membangun masyarakat terdidik, seluruh warga yang aktif, masyarakat yang terus belajar, dan memberikan kesempatan untuk semua masyarakat (Subanar, 2007). Pertumbuhan kota Yogyakarta yang cepat menjadi suatu kota yang modern memberikan peluang dan terbukanya pemikiran masyarakat dalam berkembangnya berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan. Situasi sosial yang menuntut masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan jabatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan juga turut andil dalam memotivasi untuk mengenyam pendidikan.

Yogyakarta kemudian juga tumbuh menjadi kota pendidikan dengan berbagai macam ideologi seperti kolonial, islamis dan juga nasionalistis. Dinamika pendidikan dan pertumbuhan sekolah-sekolah tidak dapat dilepaskan dari situasi kolonial dengan gaya pendidikan Barat. Semangat pendidikan ini memunculkan berbagai jenis sekolah dari jenjang yang rendah sampai dengan ke jenjang yang lebih tinggi. Semua masyarakat

Yogyakarta dari berbagai lapisan masyarakat akhirnya dapat terlayani dengan berdirinya berbagai jenis sekolah terutama sekolah partikelir dan sekolah desa yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Pada akhirnya kurun waktu tersebut juga melahirkan dua ciri khas pendidikan di Yogyakarta yang terkenal sampai sekarang ini yaitu Muhammadiyah dan Taman Siswa. Perkembangan jumlah sekolah semakin meningkat dari tahun ke tahun dan beragam jenisnya sehingga Yogyakarta dengan dinamika perubahan sosialnya sebagai kota pendidikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ASJI. (2017). *Kurikulum Berbasis Paradigma Pedagogi Ignasian Sekolah Yesuit*. Asosiasi Sekolah Yesuit Indonesia.
- Depdikbud. (1977). *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Latifa, U. (2016). Perkembangan Pendidikan Modern Di Yogyakarta Masa Kolonial Belanda Pada Tahun 1900-1942. *Avatara*, 4(3), 1028–1034.  
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/16357%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/16357/14859>
- Lombard, D. (2005a). *Nusa Jawa: Silang Budaya, Batas-Batas Pembaratan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lombard, D. (2005b). *Nusa Jawa: Silang Budaya, Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sanjaya, A. (2001). Pendidikan Modern Pribumi Masa Pergerakan Nasional. *Pendidikan Sejarah*.  
<http://lppm.univetbantara.ac.id/data/materi/ageng2.pdf>
- Sekretariat Jendral MPR RI. (2020). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (19th ed.). Sekretariat Jendral MPR RI.  
<https://books.google.co.id/books?id=YeqGDwAAQBAJ>
- Siregar, J. S. (2020). Pendidikan Berbasis Budaya Jawa Dalam Masyarakat Yogyakarta. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 4(3), 47–56.
- Subanar, G. B. (2007). *Bayang-bayang Sejarah Kota Pendidikan Yogyakarta: Komunitas Learning Society*. UniVersitas Sanata Dharma.
- Sugiyanto. (2004). YOGYAKARTA KOTA PENDIDIKAN DAN EKONOMI ALTERNATIF. *Cakrawala Pendidikan*, th.XXIII, 523–547.
- Surjomihardjo, A. (2000). *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta 1880-1930*. Yayasan Untuk Indonesia.
- Tomoredjo, M. R. (2016). *MENGGANDAKAN PEMIMPIN BESAR VERSI HOS COKROAMINOTO, MUNGKINKAH?*  
<https://www.igi.or.id/menggandakan-pemimpin-besar-versi-hos-cokroaminoto-mungkinkah.html>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (2003).  
<https://Pusdiklat.Perpusnas.Go.Id/Regulasi/Download/6>.